







# Harmonisasi

Implementasi Reformasi Birokrasi BPS Se-Sulawesi Utara

Randy Pratama Lumenta, SST, M.A.P Analis Anggaran Ahli Muda



## Tujuan dan Sasaran

**Tujuan:** Berhasilnya Implementasi Pembangunan zona integritas BPS di wilayah Provinsi Sulawesi Utara

**Sasaran:** 35 persen satker di wilayah BPS Prov. Sulawesi Utara meraih predikat WBK Internal dan BPS Provinsi WBBM Kemenpan RB. Merupakan target prioritas pertama untuk satuan kerja BPS Daerah per wilayah dari BPS RI

Sasaran Stategis BPS Tahun 2025-2029



PK belum tercapai

WBK WBBM Kemenpan RB belum tercapai



# Cascading







			Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	CAPAIAN KINERJA
	(1)		(2)	(6)	(10)	(17)	
Tuju	an 4	Peng	guatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokr	asi			
4.1	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						
	4.1.1	Persentase Satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI)		Persen	25	23,076923	92,31
		x	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM hasil penilaian TPI	Jumlah	4	3	
		у	Jumlah satker di wilayah BPS Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah	13		

Bersumber dari Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024, untuk indikator WBK Internal yang belum tercapai target – risiko belum terwujudnya good governance – rencana Pendampingan dan Pembinaan RB BPS Kabupaten Kota – Harmonisasi Implementasi RB

#### **Scorecard BPS 2025-2029**

#### SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS1	Penguatan insight berdasarkan data statistik berkualitas sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional	1. Indeks Komposit Kepuasan Pengguna
SS2	Penguatan Citra Kelembagaan BPS	1. Indeks Citra Kelembagaan BPS
SS3	Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan	1. Nilai Reformasi Birokrasi

Sebagai persiapan implementasi rencana strategis BPS 2025-2029 - sebagai dasar dalam perencanaan yang lebih matang, lebih siap, dan mempunyai mitigasi risiko.



ustrasi - Foto diambil dari p4kun/







# Chaotic Bureaucracy

Menurut Weber (1985), "Birokrasi akan berjalan baik jika semua fungsinya rasional"

Birokrasi

## **SMART**





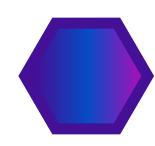




#### Specific

Target prioritas dari BPS RI yaitu 35 persen dari satuan kerja wilayah





#### Measurable

Predikat WBK dari Internal BPS & WBBM dari Kemenpan RB





#### Achievable

Berkaitan dengan tupoksi, mempunyai advantage, Potensi dari BPS Provinsi dan BPS Kabkot





#### Relevant

Berperan sebagai Change Ambasador RB, tim SAKIP, Pelayanan Publik (ISO 9001:2015), SPIP (Manajemen Risiko), Anggaran





#### Time Framed

Penilaian setiap tahunnya. Timeline Harmonisasi Implementasi RB

T

# Apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan?









#### Perubahan Perilaku

Komitmen, Awareness, tanggungjawab

## Sumber Daya

Anggaran, SDM, Kertas Kerja, Akses

#### Dukungan

Komitmen pimpinan, Bukti dukung, Kolaborasi, Awareness, Inisiasi dan tanggungjawab seluruh pegawai

#### Strategi mendapatkan feedback atas perubahan









Timeline Harmonisasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Bekerja secara tim

Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4 Aksi 5 Aksi 6 Aksi 7

Target Mandiri
Rencana Aksi
yang memuat
output yang ingin
dicapai setiap
kegiatannya

Menyusun strategi,
proses bisnis dan
timeline perencanaan,
pembinaan,
pendampingan,
monitoring dan
evaluasi hingga
penilaian internal

Koordinasi dengan atasan dan tim terkait rencana aksi yang sudah disusun dan melakukan perbaikan atas masukan/saran yang diberikan

Melakukan sosialisasi untuk penyamaan komitmen dan tujuan bersama (Satker dan wilayah) terkait rencana aksi Membentuk tim-tim yang relevan dalam seperti tim pelaksana dan manajemen dokumen (sekretariat dan pilar perubahan), tim penilai internal (TPI) dan tim penjaminan kualitas (PK)

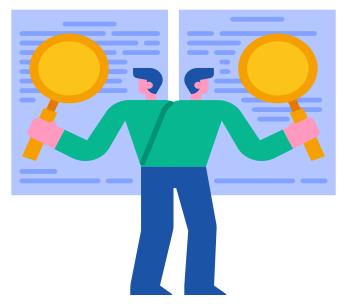
Menyusun kertas kerja Kegiatan dan penilaian

Prioritas RB TEMATIK Identifikasi pra-syarat pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Lakukan tindak lanjut perbaikan.









## Timeline Harmonisasi Implementasi Reformasi Birokrasi (2)



Pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu yang sudah ditetapkan Monitor secara berkala terkait kegiatan yang dilakukan secara bertahap di setiap satuan kerja

Evaluasi kegiatan

Penilaian
internal oleh
masing-masing
satuan kerja.
(dilanjutkan
periode tindak
lanjut TPI)

Penjaminan kualitas dari BPS Provinsi (dilanjutkan periode tindak lanjut PK & \*Pleno) REWARD

**PUNISHMENT** 

Strategi reward dan punishment bisa menjawab juga untuk pemenuhan SAKIP maupun SPIP

#### **REFERENSI**

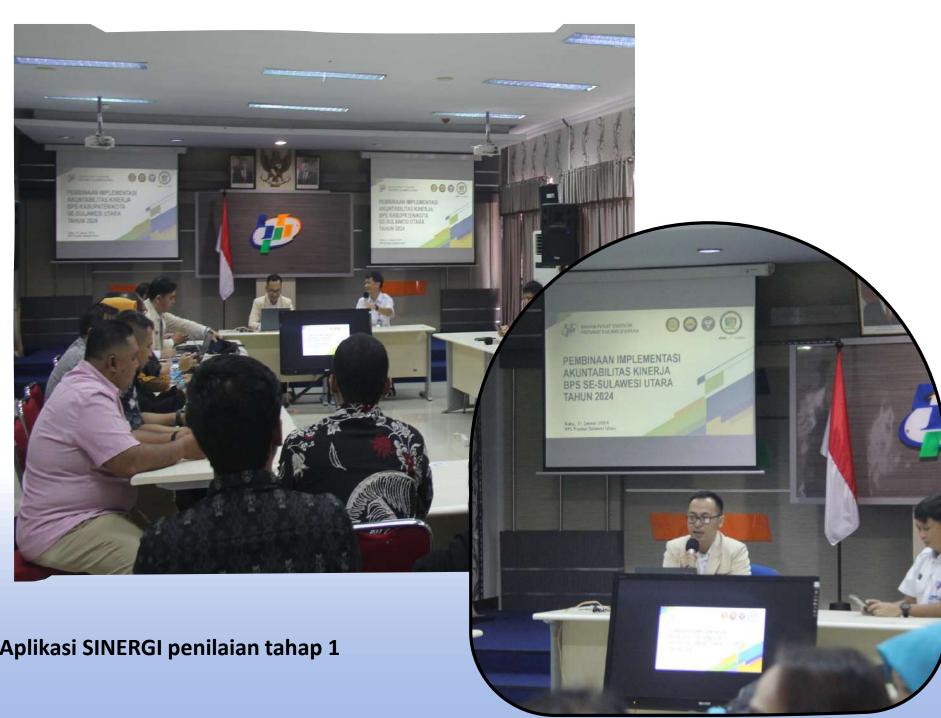
#### Harmonisasi sebagai langkah sukses mencapai tujuan bersama

#### **Nilai SAKIP 2023-2024**

Peningkatan kinerja dari BPS Kabupaten Kota Se-Sulawesi Utara sebagai DAMPAK dari Harmonisasi SAKIP:

•Tahun 2023 predikat sangat baik 7, baik 4, cukup 1

•Tahun 2024 predikat sangat baik 10, baik 2



Sumber: LHE SAKIP 2023 dan \*Hasil Aplikasi SINERGI penilaian tahap 1

#### HASIL YANG DIHARAPKAN















Akuntabilitas



Sumber Daya Manusia

## Apa Yang Berubah?









Tata laksana









"Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan."- Colin Powell





#### Rencana Aksi IST BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Harmonisasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Nama : Randy Pratama Lumenta

NIP : 198911102012111001

Unit Kerja : BPS Provinsi Sulawesi Utara

No.	Keterangan	6 (enam) bulan kedepan
1	Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai	Tujuan: Berhasilnya Implementasi Pembangunan zona integritas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
		Sasaran: 35 persen BPS Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota Se- Provinsi Sulawesi meraih predikat WBK Internal dan BPS Provinsi WBBM Kemenpan RB dalam Pembangunan Zona Integritas (Reformasi Birokrasi). Merupakan target prioritas pertama untuk satuan kerja BPS Daerah per wilayah dari BPS RI ( <i>Specific</i> )
		Indikator (tolok ukur) yang bisa diukur: Predikat WBK /WBBM ( <i>Measurable</i> )
		Dasar ( <i>Details</i> ):  - Pelaksanaan zona integritas (reformasi birokrasi) menjadi <i>issue</i> penting tahun 2024 dan menjadi salah satu sasaran strategis pada visi misi BPS Tahun 2025-2029  - BPS Provinsi belum meraih predikat WBBM sejak 2021  - Belum ada BPS Kabupaten Kota meraih predikat WBK dari Kemenpan RB  - Merupakan target Perjanjian Kinerja BPS Provinsi yang belum tercapai di tahun 2024  - Issue penting lainnya seperti IPS yang sudah tercapai target dan sebagian besar meraih nilai yang baik, kegiatan teknis statistik di BPS

- tergolong baik, Pengelolaan anggaran dan keuangan yang termasuk baik
- *Achievable* (bisa dicapai), rencana aksi pada umumnya yang dilakukan agar bisa direalisasikan sehingga penting jika berkaitan dengan tupoksi saat ini. Tupoksi dalam pekerjaan saya saat ini berkaitan erat (Relevant) dengan implementasi pembangunan zona integritas (reformasi birokrasi) dan mempunyai *advantage* terlibat dengan berbagai kegiatan organisasi penting (menjadi sasaran dalam RENSTRA 2025-2029) yang bisa mendukung berhasilnya Implementasi Pembangunan zona integritas seperti SAKIP, ISO 9001:2015 (Pelayanan publik), SPIP, Manajemen Risiko, Statistik Sektoral dan pengelolaan anggaran wilayah.
- Realistis dengan target prioritas pertama WBK sebesar 35 % dari satuan kerja di wilayah BPS Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 7 satuan kerja BPS Provinsi Sulawesi Utara telah memenuhi syarat dalam TPP BPS Prov. Sulawesi Utara sehingga membutuhkan strategi khusus untuk meloloskan ke TPI BPS RI. Pengalaman meraih WBK tahun 2021 sebagai keuntungan dalam merealisasikan rencana aksi ini.
- Dalam mewujudkan rencana aksi ini, timeline sangat dibutuhkan karena penilaian WBK WBBM mempunyai batas waktu setiap tahunnya (time framed)

- 2 Strategi Untuk Mencapai Tujuan:
  - a. Perubahan perilaku (Perubahan perilaku apa yang diharapkan?)
  - b. Sumber daya yang dibutuhkan (Peralatan, keuangan, SDM)
  - c. Dukungan dari rekan kerja dan atasan (spesifik)

- a. Perubahan perilaku:
  - Seluruh elemen di satuan kerja berkomitmen dan fokus terhadap persiapan pembangunan zona integritas.
  - awareness (kesadaran diri) implementasi pembangunan zona integritas (reformasi birokrasi) meningkat seperti pola pikir dan budaya kerja yang baik, tatalaksana dengan TI dan sesuai SOP, SDM yang BerAKHLAK, akuntabel, pengendalian dan manajemen risiko, serta pelayanan prima rutinitas meniadi dalam pekerjaan/tupoksi pegawai.
  - Tanpa disadari kegiatankegiatan perubahan yang lebih baik menjadi biasa karena rutin dilakukan. Setiap pegawai berinisiatif untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan (akuntabel), lebih bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukannya
- b. Anggaran pendampingan WBK, pembinaan Anggaran pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana atau pelayanan, **SDM** berkompeten yang memahami pembangunan zona integritas, kertas kerja (LKE) pemenuhan bukti dukung. Anggaran Sosialisasi dan pertemuan eksternal dengan terkait implementasi pembangunan zona integritas
- c. Dukungan:
  - Komitmen pimpinan untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja kabupaten kota dalam mendukung pembangunan integritas zona seperti keterlibatan secara langsung dan aktif berpartisipasi dalam pemenuhan bukti dukung

		pembangunan zona integritas.  Pemenuhan bukti dukung dan implementasi area perubahan dari rekan-rekan kerja  Pemantauan, pendampingan dan pembinaan secara bersama-sama dari tim kerja  awareness atau kesadaran diri dari seluruh pegawai akan pentingnya implementasi Pembangunan zona integritas sehingga secara mandiri mendokumentasikan serta menginisiasi kegiatan-kegiatan zona integritas (reformasi birokrasi). Setiap pegawai mengetahui peran penting masing-masing dalam kesuksesan satuan kerja meraih WBK WBBM
3	Strategi untuk mendapat feedback terhadap perubahan yang dilakukan (Termasuk pertemuan dengan rekan kerja dan atasan, pemantauan diri sendiri, reaksi bawahan, dll.)	<ul> <li>Menyusun target mandiri terkait rencana aksi implementasi pembangunan zona integritas (reformasi birokrasi)</li> <li>Menyusun strategi, proses bisnis dan timeline perencanaan, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi hingga penilaian internal agar satuan kerja mempunyai kerangka kerja yang sistematis dan target output yang relevan setiap kegiatannya.         <ul> <li>(Timeline disusun menyesuaikan dengan penilaian BPS pusat)</li> <li>Koordinasi dengan atasan dan tim terkait rencana aksi yang sudah disusun dan melakukan perbaikan atas masukan/saran yang diberikan</li> <li>Melakukan sosialisasi untuk penyamaan komitmen dan tujuan bersama (Satker dan wilayah) terkait rencana aksi</li> </ul> </li> <li>Selanjutnya proses bisnis dilakukan secara tim berupa rapat tim dalam merumuskan/menghasilkan output</li> <li>membentuk tim-tim yang relevan dalam Implementasi Pembangunan</li> </ul>

- zona integritas (reformasi birokrasi) seperti tim pelaksana dan manajemen dokumen (sekretariat dan pilar perubahan), tim penilai internal (TPI) dan tim penjaminan kualitas (PK)
- Menyusun kertas kerja kegiatan dan penilaian (Timeline Pemenuhan Bukti dukung, Core Values ASN BerAKHLAK, Intervensi Nasional, Coaching RB, SPIP, Gratifikasi, SAKIP, Pimpinan sebagai role model, Sosialisasi Pembangunan zona integritas, SPBE, SOP, PPID, Pengembangan Kompetensi, MPH-IKI. Simpeg, budaya pelayanan prima dan lainnya) agar seragam dan konsisten dalam penerapannya baik implementasi, penilaian dan penjaminan kualitas BPS Se-Sulawesi Utara
- Identifikasi pra-syarat pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Lakukan tindak lanjut perbaikan.
- Pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu yang sudah ditetapkan
- Monitor secara berkala terkait kegiatan yang dilakukan secara bertahap di setiap satuan kerja
- Evaluasi kegiatan
- Penilaian internal oleh masingmasing satuan kerja. (dilanjutkan periode tindak lanjut TPI)
- Penjaminan kualitas dari BPS Provinsi (dilanjutkan periode tindak lanjut PK dan \*pleno)
- **REWARD** untuk satuan kerja (reward untuk penambahan nilai di SAKIP BPS kabkupaten Kota, penambahan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan, skala prioritas IPLAN, serta transfer BMN barang modal)
- PUNISHMENT (Strategi reward dan punishment bisa menjawab juga untuk pemenuhan SAKIP maupun SPIP)

4	Hasil yang diharap	kan
---	--------------------	-----

- a. Apa yang berubah?
- b. Siapa yang akan melihat perubahan tersebut?
- c. Apa yang akan mereka lihat?

- a. Perubahan akan terjadi pada:
- Tata laksana dan tata kelola organisasi
- SDM BerAKHLAK
- Akuntabilitas kinerja dan administrasi
- Budaya kerja dan pola pikir
- Pelayanan publik
- b. Siapa yang melihat perubahan?
- Eksternal baik OPD maupun Konsumen data
- Sesama pegawai BPS
- c. Apa yang dilihat?
- BPS yang mempunyai pelayanan prima
- BPS yang mempunyai pegawai yang berkompeten dan BerAKHLAK
- BPS yang mempunyai tatalaksana dan tata kelola organisasi yang baik
- BPS yang tertib administrasi dan akuntabel
- BPS yang terpercaya dan kredibel